



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK PROGRAM COMPACT  
PENGELOLAAN HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan program compact pengelolaan hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) tentang pemberian pembebasan pajak daerah dalam rangka memenuhi persyaratan Entry Into Force (FIF) program Compact Green Prosperity;
- b. bahwa untuk pembebasan pajak daerah tarif sebagaimana dimaksud huruf a, pengaturannya berpedoman pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088 );

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

22. Nota Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01/MWA.I/P.2/XI/2012; Nomor 13/NK.Gub/Bappeda/2012; Nomor 203/Hk/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Green Prosperity;
23. Nota Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor 02/MWA.I/P,2/XI/2012; Nomor 12/NK.Gub/Bappeda/2012; Nomor 12/NK.Bup/Bappeda/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Green Prosperity;
24. Surat Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Majelis Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia Nomor 028/MCA.I/11/2012; tanggal 26 Nopember 2012 tentang Mekanisme Pembebasan Pajak Daerah Untuk Program Compact Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK PROGRAM COMPACT PENGELOLAAN HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC)

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan .
11. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan .
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemberian pembebasan pajak daerah, pengaturan meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- c. Pajak Kendaraan Bermotor ;
- c. Pajak Air Permukaan ;
- d. Pajak Rokok.

#### Pasal 3

Gubernur memberikan Pembebasan Pajak Daerah untuk program Compact Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) di Provinsi Jambi dengan cara wajib pajak melakukan permohonan disertai dengan alasan yang jelas serta melampirkan surat-surat atau bukti-bukti yang sah kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD setempat sesuai dengan ketentuan berlaku.

## BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 4

Pembebasan Pajak Daerah untuk Program Compact Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) di Provinsi Jambi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan berakhir pada saat Program Compact Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) di Provinsi Jambi selesai.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

**H. SYAHRASADDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 8